



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542
Fax (021) 3450038 www.kemendagri.go.id Email: biro_kepegawaian@kemendagri.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : 810/3732/SJ**

**TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 881 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditugaskan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tersebar di wilayah Republik Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN (ALOKASI PENEMPATAN)

1. Sekretariat Jenderal.
2. Inspektorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
4. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi.
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung.
 - c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Yogyakarta.
 - d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Makassar.
9. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
 - a. IPDN Kampus Jatinangor.
 - b. IPDN Kampus Sulawesi Utara.
 - c. IPDN Kampus Sulawesi Selatan.
 - d. IPDN Kampus Kalimantan Barat.
 - e. IPDN Kampus NTB.
 - f. IPDN Kampus Jakarta.

10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
 - a. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.
 - b. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.
 - c. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau.
 - d. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota'ain.
 - e. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin.
 - f. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini.
 - g. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS KEBUTUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			CUM LAUDE (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
			20	4	3	170	197	
1	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER				1	1	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
						1	1	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA
2	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI				1	1	IPDN KAMPUS NTB
						1	1	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PSIKOLOGI		1		4	5	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
						2	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 SOSIOLOGI				3	3	SEKRETARIAT JENDERAL
						2	2	IPDN KAMPUS JAKARTA
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL
6	AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN SDM				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL
7	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 AKUNTANSI	5			16	21	INSPEKTORAT JENDERAL
8	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH	S-1 BAHASA INGGRIS				1	1	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT
				1		1	2	IPDN KAMPUS JAKARTA
9	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU SOSIAL				5	5	INSPEKTORAT JENDERAL
10	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM				3	3	SEKRETARIAT JENDERAL
11	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 ILMU HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			CUM LAUDE (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
12	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 EKONOMI / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 GEOGRAFI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	3	1		6	10	SEKRETARIAT JENDERAL
						1	1	INSPEKTORAT JENDERAL
					1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
13	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 INFORMATIKA DAN JARINGAN KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA (SPECIALISASI PROGRAMMER) / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA / S-1/D-IV ILMU KOMPUTER				1	1	IPDN KAMPUS NTB
						2	2	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA
						1	1	IPDN KAMPUS JAKARTA
						1	1	IPDN KAMPUS JATINANGOR
						1	1	SEKRETARIAT JENDERAL
						1	1	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT
14	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN				3	3	IPDN KAMPUS JATINANGOR
15	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 HUKUM S-2 STUDI PEMBANGUNAN / S-2 EKONOMI / S-2 PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH / S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-2 ILMU PEMERINTAHAN / S-2 PSIKOLOGI	2			1	3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						1	1	PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI
			1			1	2	PPSDM REGIONAL BANDUNG
						2	2	PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA
					2	2	PPSDM REGIONAL MAKASSAR	
16	ANALIS ADVOKASI HUKUM	S-1 ILMU HUKUM				1	1	BNPP
						1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
17	ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM				1	1	BNPP
18	ANALIS HUMAS	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER JURUSAN SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER MULTIMEDIA / S-1 KOMUNIKASI (BROADCASTING)				1	1	BNPP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			CUM LAUDE (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
19	ANALIS INFRASTRUKTUR	S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA / S-1 ARSITEKTUR				3	3	BNPP
20	ANALIS JABATAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM				1	1	BNPP
21	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 STATISTIK				2	2	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22	ANALIS KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK				2	2	BNPP
23	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SOSPOL				1	1	BNPP
24	ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK				1	1	BNPP
25	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 ILMU PSIKOLOGI / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK				1	1	BNPP
26	ANALIS KINERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMPUTER			1	2	3	SEKRETARIAT JENDERAL
27	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK				1	1	BNPP
28	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	D-IV AKUNTANSI KEUANGAN / S-1 AKUNTANSI				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL
						1	1	BNPP
						1	1	PLBN MOTA'AIN
						1	1	PLBN MOTAMASIN
						1	1	PLBN SKOUW
						1	1	PLBN ENTIKONG
29	ANALIS PELAYANAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	PLBN MOTA'AIN
						1	1	PLBN WINI
						1	1	PLBN SKOUW
						1	1	PLBN ENTIKONG
						1	1	PLBN BADAU
						1	1	PLBN MOTAMASIN
						1	1	PLBN ARUK
30	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	BNPP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			CUM LAUDE (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
31	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	S-1 INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SOSPOL / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL				1	1	BNPP
32	ANALIS PENGEMBANGAN DAN PENATAAN BATAS ANTAR NEGARA	S-1 INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SOSPOL / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL			1	2	3	BNPP
33	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN		1		1	2	BNPP
34	ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	S-1 GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN				2	2	BNPP
35	ANALIS POTENSI KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 TEKNIK HIDROGRAFI				1	1	BNPP
36	ANALIS TATA LAKSANA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	BNPP
37	ANALIS TUNTUTAN GANTI RUGI	S-1 ILMU HUKUM				1	1	BNPP
						1	1	PLBN ARUK
						1	1	PLBN BADAU
						1	1	PLBN MOTA'AIN
						1	1	PLBN MOTAMASIN
38	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III MANAJEMEN AKUNTANSI / D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI NEGARA				1	1	PLBN BADAU
						1	1	PLBN MOTAMASIN
						1	1	PLBN ENTIKONG
39	PENGELOLA INFORMASI LINTAS BATAS NEGARA	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI				1	1	PLBN ARUK
						1	1	PLBN MOTAMASIN
						1	1	PLBN SKOUW
						1	1	PLBN ENTIKONG
						1	1	PLBN BADAU
40	PENYUSUN RENCANA IDENTIFIKASI POTENSI PULAU-PULAU KECIL	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 GEOGRAFI				2	2	BNPP
41	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 STATISTIK / S-1 AKUNTANSI				7	7	BNPP
						1	1	PLBN MOTAMASIN
						1	1	PLBN SKOUW
						1	1	PLBN ENTIKONG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			CUM LAUDE (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
42	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	D-III AKUNTANSI				1	1	BNPP
43	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	D-III TEKNIK LISTRIK / D-III TEKNIK KOMPUTER				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL
44	VERIFIKATOR ANGGARAN	D-III AKUNTANSI				1	1	BNPP
45	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	D-III AKUNTANSI				1	1	BNPP
46	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI				1	1	BNPP
						1	1	PLBN WINI
						1	1	PLBN MOTAMASIN
47	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 HUKUM TATANEGARA	3			3	6	IPDN KAMPUS JATINANGOR
						1	1	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
						1	1	IPDN KAMPUS NTB
						1	1	IPDN KAMPUS JAKARTA
		S-2 ILMU KOMPUTER / S-2 TEKNOLOGI INFORMASI / S-2 INFORMATIKA	3			6	9	IPDN KAMPUS JATINANGOR
						1	1	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
						2	2	IPDN KAMPUS NTB
						1	1	IPDN KAMPUS JAKARTA
		S-2 KEBIJAKAN PUBLIK	3			3	6	IPDN KAMPUS JATINANGOR
						1	1	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
						1	1	IPDN KAMPUS NTB
						1	1	IPDN KAMPUS JAKARTA
		S-2 MANAJEMEN SDM				2	2	IPDN KAMPUS JATINANGOR
						1	1	IPDN KAMPUS NTB
		S-2 ILMU ADMINISTRASI				1	1	IPDN KAMPUS JATINANGOR
				1	1	IPDN KAMPUS NTB		

Catatan:

- Untuk kualifikasi Pendidikan S-1 Hukum/Illmu Hukum dapat dipilih oleh Pelamar yang berasal dari semua jurusan/program studi hukum.
- Untuk kualifikasi Pendidikan S-1 Ekonomi dapat dipilih oleh Pelamar yang berasal dari semua jurusan/program studi Ekonomi.
- Untuk kualifikasi Pendidikan S-1 Manajemen dapat dipilih oleh Pelamar yang berasal dari semua jurusan/program studi Manajemen.

III. KRITERIA PELAMAR

1. **Lulusan Terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude** adalah pelamar lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude yang dibuktikan dengan keterangan lulus “dengan pujian”/cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
3. **Putra/Putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua/Papua Barat, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku;
4. **Pelamar Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pada angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat pelamar mengklik akhiri pendaftaran online di <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenis;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

12. Merupakan lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dengan tingkat pendidikan:
 - a. Magister (S-2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4; dan
 - b. Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (D-III) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,85 (dua koma delapan lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4.
13. Telah memperoleh penetapan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Kebutuhan Umum

- a. Bagi pelamar yang mendaftar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (khusus Jabatan Fungsional Dokter bukan STR *internship*) sesuai jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
- b. Bagi pelamar yang mendaftar pada kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen dan Widyaiswara, wajib menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat hasil *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction* dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal 450 (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 133/*Internet Based TOEFL* minimal 45/*TOEIC* minimal 405/*IELTS* minimal 5,5).

2. Kebutuhan Khusus

a. **Pelamar Lulusan Terbaik Berpredikat “dengan pujian”/cumlaude**

- 1) Dikhususkan untuk kebutuhan jabatan dengan jenjang pendidikan minimal Sarjana/S-1, tidak termasuk Diploma IV/D-IV;
- 2) Lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude yang dibuktikan dengan keterangan lulus “dengan pujian”/cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai;
- 3) Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, **sedangkan** bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

b. **Pelamar Penyandang Disabilitas**

- 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

- 2) Menyampaikan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- c. **Pelamar Putra/putri Papua dan Papua Barat**
- 1) Melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) Melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

A. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* pada SSCASN, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Pelamar mengunggah Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan Pengganti KTP-el/Surat Keterangan Perekaman Data KTP-el asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Pelamar mengunggah swafoto dan melakukan pengecekan ulang data;
 - e. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar log in ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri yang valid;
4. Pelamar memilih instansi Kementerian Dalam Negeri dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi kebutuhan, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
5. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
7. Simpan data yang telah diperiksa pada “*Resume Pendaftaran*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
8. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran yang dapat diunggah pada SSCASN serta mengunggah (*upload*) dokumen dalam bentuk *softcopy* yang meliputi:

1. Pasfoto berwarna dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berlatar belakang merah, berpakaian formal dengan ukuran 4 x 6 (**Pas foto terbaru paling lama 6 bulan terakhir**);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang masih berlaku/Surat Keterangan Perekaman data KTP-el asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku (**Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca**);
3. Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar, untuk pelamar tenaga kesehatan disertai STR yang masih berlaku sesuai jabatan yang

dilamar (khusus Jabatan Fungsional Dokter bukan STR *internship*);
(Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca)

4. Transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipersyaratkan **(Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca);**
5. Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan bermaterai Rp. 10.000,- ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam. Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan tanggal pada saat melakukan pendaftaran *online* **(format surat lamaran sebagaimana dalam lampiran I pengumuman ini);**
6. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan bermaterai Rp. 10.000,- ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam **(format surat pernyataan sebagaimana dalam lampiran II pengumuman ini);**
7. Surat keputusan penyetaraan ijazah asli oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri **(Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca);**
8. Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan yang diunduh melalui direktori Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi program studi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau *scan* surat akreditasi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sertifikat *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction/Computer Based TOEFL/Internet Based TOEFL/TOEIC/IELTS* dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi pelamar jenis kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen dan Widyaiswara.
10. Bagi pelamar Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*:
 - a. Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar dan/atau transkrip nilai yang dibuktikan dengan adanya kata “dengan pujian”/*cumlaude* **(Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca);**
 - b. Surat penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perguruan tinggi luar negeri **(Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca);**
 - c. Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan yang diunduh melalui direktori Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi program studi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau *scan* surat akreditasi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas:
 - a. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (**Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca**)
 - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar (***Link* video yang diunggah dapat dibuka, tidak rusak, jelas dan terlihat**).
12. Bagi pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat:
Surat Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku (**Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotocopy, jelas dan terbaca**).
13. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - Seleksi Administrasi adalah pelaksanaan verifikasi persyaratan administrasi jabatan yang ditentukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi dan telah mengunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - Pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui SSCASN, Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dan mengumumkan ulang hasil Seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - Menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi yang disusun oleh Panselnas Pengadaan PNS.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional, sedangkan untuk Jabatan Pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
4. Pengumuman Hasil Akhir
 - Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Menteri secara terbuka berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas.

- Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN, Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, Panitia Seleksi melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi jabatan yang ditentukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen pelamaran yang telah diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
2. Penentuan kelulusan bagi pelamar yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditetapkan berdasarkan Nilai Ambang Batas (*passing grade*) kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.
3. Pengumuman Kelulusan hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
4. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan.
5. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud angka 4 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan SKB.
6. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas dengan ketentuan SKD dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan SKB dengan bobot 60% (enam puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Peserta wajib memantau seluruh proses tahapan seleksi melalui portal PANSELNAS dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dan portal CPNS Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan alamat <https://infocpns.kemendagri.go.id>;
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan waktu pelaksanaan seleksi diberlakukan sama dengan pelamar pada kebutuhan umum atau khusus lainnya;
3. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan agar tidak melakukan pendaftaran;

4. Dokumen pelamaran yang telah diunggah tidak dapat diperbaiki jika peserta mengklik akhiri pendaftaran sesuai mekanisme SSCASN;
5. Kesalahan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh pelamar dapat **menggugurkan** keikutsertaan pada Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri;
6. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 hanya menerima pendaftaran secara daring melalui portal SSCASN dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
7. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan:
 - a. Ketidak lengkapan administrasi dan/atau kelalaian mengikuti jadwal pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;
 - b. Terkonfirmasi positif Covid-19, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dokter dan/atau hasil *Swab PCR* dan keterangan menjalani isolasi dari Pejabat yang Berwenang dapat mengikuti pelaksanaan seleksi dengan jadwal yang diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi apabila terlebih dahulu telah melaporkan pada Panitia Seleksi;
8. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
9. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Menteri tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
10. Peserta wajib mengikuti pemberkasan akhir guna penelitian berkas dalam rangka proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Apabila peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk 1 (satu) periode berikutnya;
12. Peserta dihibau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
13. Peserta, keluarga, dan/atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi dan pihak-pihak lain di lingkungan Kementerian, apabila diketahui akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
14. Kementerian Dalam Negeri tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas namakan Kementerian Dalam Negeri atau Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021;
15. Seluruh proses Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri ini **tidak dipungut biaya apapun**;
16. Seluruh keputusan Panitia Seleksi adalah **mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**;

17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dapat menghubungi *Call Center* di nomor telepon (021) 50958800 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 – 16.00 WIB dan *Help Desk* Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dengan alamat <https://infocpns.kemendagri.go.id>.

Jakarta, 30 Juni 2021

**SEKRETARIS JENDERAL SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PNS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2021**



Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

**JADWAL PELAKSANAAN
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	17 s.d. 18 Oktober 2021
9.	Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	19 Oktober s.d. 1 November 2021
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	8 s.d. 29 November 2021
11.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
13.	Masa sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
14.	Jawab sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
15.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
16.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
17.	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Catatan: Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

**SEKRETARIS JENDERAL SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PNS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2021**



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

LAMPIRAN I

Contoh Surat Lamaran

Jakarta,

Yth. Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Jenjang Pendidikan :
Program Studi :
Jabatan yang dilamar :

(sesuai jabatan yang dilamar pada SSCASN)

Alamat Domisili :
Nomor Telepon :
Alamat E-mail :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

MATERAI Rp. 10.000,-

(.....)

LAMPIRAN II

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP/Identitas :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenis.
9. Menyandang disabilitas sesuai surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya **(Khusus Penyandang Disabilitas) ***
10. Memiliki keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak dan/atau Ibu asli Papua/Papua Barat). **(Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat) ****
11. Seluruh dokumen unggah dan data yang saya berikan pada portal SSCASN atau saat pemberkasan proses penetapan NIP adalah benar/bukan palsu.
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
13. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

MATERAI Rp. 10.000,-

(.....)

Catatan

1. Poin pernyataan bertanda * wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
2. Poin pernyataan bertanda ** wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
3. Poin pernyataan bertanda * dan ** wajib dihapus bagi pelamar kebutuhan umum yang tidak menyandang disabilitas dan bukan keturunan asli Putra/Putri Papua dan Papua Barat serta mengubah poin nomor 11 menjadi nomor 9, dan seterusnya sehingga bagi pelamar umum hanya terdapat 11 poin pernyataan.
4. Apabila ada poin yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan poin tersebut sehingga dapat digugurkan.